

Islamic Educational Management Journal

Integrated Applied of Islamic Educational Management and its Concept

Tarbiyah ūli al albāb : Ideologi Pembaharuan Kepemimpinan Perguruan Tinggi

Moh Padil = 7 - 30

Penilaian *School Investment Plan* untuk Efektivitas Pengelolaan Sekolah

Agung Nugroho = 31 - 48

Internalisasi *Religious Culture* Melalui Manajemen Pembiasaan Diri

di SMKN I Klungkung Bali

Widyanti Herdyaningrum = 49 - 70

Kontruksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

M Mujab = 71 - 84

Aktualisasi *Principles of Corporate Management* dan Budaya Perubahan

Perspektif Kiai Pondok Pesantren

Mardiyah = 85- 108

Varian Interaksionisme Simbolik Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Sidogiri

Sugeng Haryanto = 109 - 136



Islamic Educational Management Journal

Integrated Applied of Islamic Educational Management and its Concept

I S S N : 2 0 8 9 - 0 3 9 1

Volume I, No. 1, August – December 2011

Editorial Address:

Department of Islamic Education Management,
Postgraduate Program
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Indonesia
Gajayana Street 12 Malang 65144 Telp. 0341-551354, Fax. 0341-572533
E-mail: jurnalmpi_ppsuinmalang@yahoo.com

Islamic Educational Management Journal

Integrated Applied of Islamic Educational Management and its Concept

Volume I, No. 1 Agustus - Desember 2011

Penanggung Jawab

Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang

Redaktur Ahli / Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Muhaimin (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Prof. Dr. H. Dade Rosyada, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadhol, M.Pd (Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Nanang Fatah, M.Pd (UPI Bandung)

Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Ian M. Robothom (Associate Dean(International) Faculty of Art and Education: Deaken University)

Prof. Dr. Sunita Sing Sengupta (Delhi University)

Prof. Saud Alam (Aligarh Moslem University of India)

Prof. Akhtarul Wasey (Jami'a Mutlia Islamiyah India)

Pemimpin Redaksi

Dr. H. M. Mujab, MA

Sekretaris Redaksi

Dr. Hj. Sutiah. M.Pd

Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd

Dr. H. Samsul Hady, M.Ag

Dr. H. Zaenuddin, MA

Dr. H. Sugeng Listiyo Prabowo, M.Pd

Slamet, SE., MM., Ph.D

Sekretariat

Dr. H. A. Fatah Yasin, M.Ag

Drs. Agus Sucipto, MM

Angga Teguh Prastyo, M.Pd

Iqbal Kuncoroningrat, S.Psi

Islamic Educational Management Journal terbit enam bulan sekali. Redaksi menerima tulisan mengenai wawasan manajemen pendidikan Islam berbentuk artikel, makalah, laporan penelitian, hasil wawancara, maupun telaah pustaka. Panjang tulisan antara 15-20 halaman A4 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk print out dan file. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Islamic Educational Management Journal

Integrated Applied of Islamic Educational Management and its Concept

Volume I, No. 1 Agustus - Desember 2011

Daftar Isi

Kolom Redaksi

Kepemimpinan Integratif Menuju Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam = 1 - 6

Tarbiyah ūli al albāb : Ideologi Pembaharuan Kepemimpinan Perguruan Tinggi

Moh Padli = 7 - 30

Penilaian **School Investment Plan** untuk Efektivitas Pengelolaan Sekolah

Agung Nugroho = 31 - 48

Internalisasi **Religious Culture** Melalui Manajemen Pembiasaan Diri

di SMKN I Klungkung Bali

Widyanti Herdyaningrum = 49 - 70

Kontruksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

M Mujah = 71 - 84

Aktualisasi *Principles of Corporate Management* dan Budaya Perubahan

Perspektif Kiai Pondok Pesantren

Mardiyah = 85- 108

Varian Interaksionisme Simbolik Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Sidogiri

Sugeng Haryanto = 109 - 136

Kapabilitas Kepemimpinan Kepala SMP Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah

sebagai Motivator Guru

Ratiah = 137 - 156

Diversifikasi *In Service Training* untuk Pengendalian Mutu Pendidik

Muhamad Hasbi = 157 - 174

Pemodelan *Middle Range Theory* dalam Analisis Fungsional Kepemimpinan Kiai Sholeh

Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural

di Universitas Yudharta Pasuruan

Sulalah = 175 - 204

Studi Hermeneutika Akar-Akar Kekerasan dalam Dunia Pendidikan

Zulfi Mubarak = 205 - 236

Kontruksi Kebijakan Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional



M Mujab

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

The idea policy of international school establishment appears when the education quality in Indonesia looks so low in competitiveness. Therefore, the government designs programs and policies for increasing the education quality in Indonesia. The appearing of International School is expected to encourage the quality and competitiveness of education institution in Indonesia. Not only that, it is also hoped to anticipate the increasing of international labor migration and to keep job vacancy for Indonesian labor in national job market that organized by foreign companies in Indonesia. Thereby, one of International school establishment ideas is to anticipate the work rivalry in national even international level.

Keywords: policy, international school, competitiveness

Abstrak

Ide kebijakan munculnya sekolah bertaraf internasional diawali dengan adanya keprihatinan tentang mutu pendidikan di Indonesia yang dianggap kurang memiliki daya saing. Untuk itu, pemerintah berupaya mendesain berbagai program dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Disamping untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan, keberadaan sekolah bertaraf internasional juga diharapkan mampu mengantisipasi meningkatnya migrasi tenaga kerja internasional dan sekaligus untuk mempertahankan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Dengan demikian, pendirian sekolah bertaraf internasional digagas salah satunya untuk mengantisipasi persaingan kerja di tingkat nasional dan internasional.

Kata kunci: kebijakan, sekolah bertaraf internasional, keunggulan

A. Revitalisasi Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan bangsa.

Ini berarti semakin berkualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah bangsa.

sa, maka akan semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Sebagaimana diketahui pada era global ini, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumberdaya manusia (SDM). Kesemuanya dapat ditunjang dengan adanya pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, penataan sistem kelembagaan serta peningkatan kesejahteraan yang memadai. Oleh karenanya, mencetak SDM yang berkualitas dan tenaga kependidikan merupakan kebutuhan mendesak. Itu semua tidak bisa diabaikan. Sebab, sesungguhnya faktor-faktor tersebut menempati posisi sentral dalam mengejawantahkan dan melahirkan sistem pendidikan berkualitas di negeri ini.

Pendidik menjadi unsur dasar pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri, terutama bagi penciptaan SDM yang unggul. Disinilah peran manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan dihadirkan. Dengan begitu, manajemen pendidikan sesungguhnya dilakukan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara”.

Sejauh ini, belum pernah digelar

seminar atau workshop di lingkungan perguruan tinggi agama Islam seperti UIN, IAIN, STAIN dan perguruan tinggi lain tentang pembahasan sistem pendidikan yang komprehensif. Selain itu, juga belum pernah ada konsensus atau kesepakatan bersama mengenai pentingnya kerjasama atau *networking* antar pengembangan sistem pendidikan yang komprehensif dalam merumuskan epistemologi, arah kebijakan, dan kurikulumnya secara lebih luas dan integratif.

Persoalan yang timbul pada setiap pengembangan sistem pendidikan adalah *core of science* dan *State of the Arts*-nya. Sebab, setiap adanya usaha pengembangan sistem pendidikan secara substansial berarti akan terjadi pembedaan wilayah antara agama dan non agama. Proses itu dijalankan tanpa ada tindakan serius dan pada akhirnya terkadang diendapkan tanpa ada penyelesaian. Padahal di negara China perhatian terhadap manajemen pendidikan begitu besar, seperti diungkap berikut ini;

There are a number of reasons why the improvement of educational management and the effective implementation of educational policy in any country should be given high priority. Educational management has an impact on the teaching and learning process, the organizational practices of school units, the utilization of both human and material resources, and the use of efficiency criteria and control systems. Educational poli-

cy provides guidelines for decision making, while the decision-making process itself influences the determination of policy.¹

Begitu juga dengan reformasi pendidikan di China, perubahan demi perubahan dalam sistem pendidikan mengantarkan pada model baru yang ditempuh pemerintah dalam sistem rekrutmen tenaga pendidik. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak, antara pihak sekolah sebagai pengontrak dan tenaga pendidikan sebagai pihak ke II terjadi kesamaan hak, dan kedua belah pihak memiliki posisi setara.

Perbaikan manajemen pendidikan di China dilakukan dengan mengubah syitem kontrak kerja tenaga pendidik. Perubahan pendidikan terjadi amat luar biasa ketika sistem kontrak tersebut diterapkan.

This law brings some great changes to teachers. First, it means that the relationship between school and teacher has changed to labor employment relationship between employer and employee rather than the previous administration relationship between the subordinate and the superior. School and teacher become "equal" contract relationship. Teachers have the freedom to choose the schools where they like to work, and the freedom to quit from the school they dislike. As for schools, they also have the freedom to hire or fire the staff. Second, the law leads

¹ Anonim, *International Journal of Educational Management* Vol. 23 No. 6, 2009, pp. 446

to the change of teachers' status. Before the issue of the law, teachers was regarded as state cadres (Guojia Ganbu).²

Kondisi lembaga pendidikan Islam, pun mengalami kesulitan dalam pengembangan budaya organisasi. Namun, menurut Minhad Astoriq dalam Husaini Usman, menyatakan; meskipun belum dilakukan penelitian khusus tentang guru-guru maupun kepala sekolah tetapi ada ketidak konsistensian di dunia pendidikan Indonesia, misalnya; ketika hendak dilakukan penilaian kinerja sekolah, satuan pendidikan tersebut tiba-tiba menjadi serba baik. Apa pun caranya, semua guru harus memiliki perangkat mengajar yang lengkap dan baik, Absen guru harus nihil, Kalau tidak masuk harus ada surat ijin atau surat keterangan sakit. Tidak boleh ada sampah berserakan di sekolah. Adminstrasi dan keuangan sekolah harus tertib dan lancar. Keadaan demikian juga terjadi kalau sekolah yang bersangkutan mau diakreditasi.³ Lebih lanjut menurut Paul Suparno dalam Usman; mengatakan bahwa budaya lembek sudah mempengaruhi dunia pendidikan yang disebabkan oleh faktor yang timbul baik dari dalam peserta didik, sekolah maupun keluarga. Budaya lembek juga dipengaruhi

² Anonim, *Reform of Teacher's Employment System and Children's Rights To Education in China*, *International Journal of Educational Management*-Vol. 23 No. 1, 2009, hlm. 7

³ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, (jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23

sekolah, karena banyak guru yang tidak berani menuntun secara tegas kepada peserta didik belajar lebih keras.⁴

Hingga saat ini sistem pendidikan dalam tataran implementasi di sekolah masih dianggap kurang berhasil. Beragam argumentasi dikemukakan untuk mendukung pendapat tersebut. Paling tidak, ada tiga argumentasi yang bisa dikemukakan. *Pertama*, pendidikan kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “nilai” yang mampu mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan. *Kedua*, pendidikan selama ini lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing*, belum banyak mengarah kepada aspek *being*, yaitu bagaimana menjadikan peserta didik mampu menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui (*knowing*). *Ketiga*, pendidikan kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian di masyarakat.⁵ Terkait dengan problem di atas, seharusnya sasaran pendidikan dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dilakukan agar sistem pendidikan yang dijalankan mampu menghasilkan mutu lulusannya yang mam-

pu bersaing dalam skala global. Pada tahap kedua pendidikan, mestinya mampu mengantarkan kepada peserta didik memasuki tuntutan dalam masyarakat industri atau ekonomi. Dimana tuntutannya tidak lagi cukup dengan keterampilan motorik yang kaku, melainkan diperlukan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan seperti *controlling, monitoring, maintaining, designing, organizing* yang relevan dengan kemajuan teknologi. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menyiapkan anggota masyarakat memasuki dunia kerja yang menuntut bukan saja keterampilan mekanistik, tetapi meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain serta mengelola dan mengatasi konflik.

Jika demikian arah dan tujuannya, maka kurikulum yang dirancang dalam sistem pendidikan, selain harus mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat, juga harus didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, yaitu tenaga pendidik yang memiliki kemampuan merencanakan, mengelola, dan mendiagnosis proses pembelajaran secara tepat. Bahkan tidak cukup dengan itu, tenaga pendidik juga dituntut dapat memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang didasarkan atas pemahaman yang baik terhadap peserta didik. Hal tersebut merupakan muara untuk melahirkan *output* pendidikan berkompotensi handal dalam menangani problem-problem pendidikan Islam secara mikro

⁴ Husaini Usman, *Manajemen, Teori...*, hlm. 25

⁵ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 31

maupun makro. Jika dipetakan, problem-problem kependidikan secara umum terdiri dari tiga ranah utama yaitu: (1) fundamental, (2) struktural, (3) operasional.

Pertama, problem fundamental meliputi manajemen pengembangan pendidikan di sekolah, analisis manajemen kebijakan standar kompetensi lulusan sekolah bertaraf internasional, analisis kritis tentang kebijakan standar isi sekolah bertaraf internasional, analisis kritis tentang pembelajaran sekolah bertaraf internasional, analisis kritis kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf internasional, analisis kritis kebijakan standar sarana dan prasarana sekolah bertaraf internasional, analisis kebijakan standar pengelolaan pendidikan sekolah bertaraf internasional, manajemen kebijakan tentang komite sekolah bertaraf internasional, manajemen kebijakan Peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah, manajemen pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan sebagainya..

Kedua, problem struktural. Ditinjau dari struktur demografis dan geografis, sistem pendidikan bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa dan desa terpencil; Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa anak, remaja, dewasa, dan manula; Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam kaya, menengah, miskin/fakir; Dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga

karir dan non karir; dan dari struktur atau jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; dan seterusnya

Ketiga, problem operational yang secara mikro. Fase ini terdiri dari berbagai faktor/unsur/komponen dalam pendidikan Islam. Misalnya hubungan interaktif lima faktor pendidikan, yaitu: tujuan pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; peserta didik; alat-alat pendidikan Islam (kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana/prasarana, media/sumber, evaluasi, biaya, Humas, dan lain-lain), dan lingkungan atau konteks pendidikan. Bisa pula bertolak dari hubungan input, proses (instrumental dan lingkungan), dan *output* serta *outcome*. Sedangkan secara makro, menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama baik yang bersifat nasional maupun transnasional.⁶

Secara umum bisa dikatakan, banyak tantangan dan problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan, mulai dari masalah etika dan moralitas hingga berbagai isu global dan nasional, perlu mendapat perhatian. Isu-isu global, antara lain yang menyangkut revitalisasi pemahaman pendidikan, kompetisi atau daya saing internasional, maupun liberalisasi pendidikan perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan isu-isu nasional antara lain menyangkut pendidikan multi-

⁶ Muhaimin, *Rekonstruksi..*, hlm. 34

kultural dan *civic values* (hak asasi manusia, penegakan hukum, demokrasi dan gender), dikotomi pendidikan, pendidikan transformatif, kapitalisasi pendidikan, komitmen APBN bidang pendidikan, dan daya saing nasional juga harusnya ditindaklanjuti. Lebih lanjut, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem organisasi yang terdiri atas konteks, *input*, *proses*, *output* dan *outcome*, menghadapi tantangan yang cukup berat dewasa ini. Contoh yang dapat diambil dalam *konteks* itu antara lain terdiri dari atas landasan hukum saat ini, kebijakan pemerintah yang berlaku, tuntutan pengembangan diri dan peluang lulusan, otonomi pendidikan, globalisasi, nilai-nilai harapan masyarakat, dunia usaha dan industri, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumberdaya manusianya. *Input* pendidikan, yang meliputi visi, tujuan, sasaran, program, kurikulum, ketenagaan, peserta didik, sarpras, dana, regulasi, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat, dan budaya sekolah harus segera direvitalisasi. Sementara *output* pendidikan yang meliputi prestasi akademik dan nonakademik harus segera disergikan dengan tujuan pendidikan nasional. Pada akhirnya kesemuanya mengarah kepada terbentuknya *outcome* pendidikan yang antara lain menggambarkan dari banyaknya peserta didik yang memiliki kesempatan untuk studi lanjut, bekerja, dan mengembangkan diri.

Secara teoritis, jika sebuah sistem

pendidikan mau mengembangkan diri, maka harus dimulai dari memperbaiki *outcome*-nya. Itu berarti dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dimulai dari pemecahan masalah dan melihat analisis dari konteksnya. Untuk menghindari pemecahan sepotong-sepotong, maka pendekatan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan sistemik. Artinya perubahan harus dengan cara melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang tersistem.⁷ Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka pemerintah melakukan program sekolah bertaraf internasional (SBI) sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan atau negara maju lainnya yang dirumuskan dengan NSP + X. Secara definitif sekolah bertaraf Internasional merupakan satuan pendidikan yang yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju

Sejak digulirkannya kebijakan tentang pendirian SBI, pemerintah banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat, praktisi pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat. Kritik-kritik itu pada umumnya menyuarakan ketidak-setujuannya terhadap langkah pemerintah yang dipandang sebagai kebijakan yang “tergesa-

⁷ Husaini Usman, *Manajemen, Teori...*, hlm. 56

gesa". Kritik tersebut berisi tentang kurang berpihak pemerintah terhadap pendidikan masyarakat pada lapisan bawah, kritik penggunaan bahasa asing serta kritik atas ketidak kesiapan pihak sekolah dalam mengimplementasikan program-program SBI yang dipandang cukup berat dan rumit terutama bagi sekolah-sekolah di daerah.

Kritik juga dilontarkan karena belum adanya acuan operasional yang jelas tentang dibangunnya faktor X yang dimaksud dalam ketentuan pengembangan kurikulumnya. Ini yang menyebabkan SBI di Indonesia menjadi berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut mengakibatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya tidak seragam.

Sampai saat ini, di Indonesia sudah berdiri ratusan sekolah SBI dari berbagai tingkatan dengan penggunaan sistem yang berbeda-beda dalam pengembangan kurikulumnya. Paling tidak ada tiga sistem digunakan oleh sekolah-sekolah bertaraf Internasional di Indonesia, yaitu, *International Baccalaureate (IB)*, *Cambidge*, dan *Australian Curriculum*. Kekurangsiapan penguasaan bahasa Inggris bagi para tenaga pendidik juga menjadi hambatan tersendiri bagi sekolah-sekolah tersebut. Belum lagi soal biaya operasional yang tinggi sehingga mengakibatkan adanya jurang antara yang kaya dan miskin. Tingginya biaya pendidikan SBI, disamping dialokasikan untuk melengkapi teknologi informasi dan kelas

multimedia juga diakibatkan oleh sistem adopsi kurikulum yang disebut sebagai *commitmen fee* sebanyak 20 juta (duapuluh juta rupiah) pertahun. Bahkan untuk mendapatkan sertifikat /pengakuan dari salah satu sekolah model di luar negeri, setiap mata pelajaran dikenakan biaya 1 (satu juta). Hal ini di luar perhitungan uang untuk biaya kerjasama pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen.

B. Pendidikan Internasional dan Identitas Kebangsaan

Sebagai anggota komunitas global, Indonesia berada dalam pergulatan antar-bangsa terutama dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai bangsa besar, kita tidak bisa menghidarkan diri dari pengaruh pergaulan global yang mengharuskan persaingan dengan bangsa-bangsa lain.. Untuk mengatasi tantangan di atas, maka diperlukan pendidikan yang berkualitas. Sebab, hal tersebut merupakan indikator mutlak di dalam persaingan internasional. Digulirkannya kebijakan standar nasional pendidikan dan standar internasional tentu hanya dapat dicapai secara bertahap, bukan secara sekuensial. Tetapi yang perlu diingat, peningkatan mutu pendidikan dengan melakukan stadarisasi (bertaraf Internasional) sepatutnya tidak melupakan esensi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utama

di sini bukanlah persaingan dalam arti *the survival of the fittest*, tetapi yang merupakan subjek pendidikan sesungguhnya adalah anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harkat anak bangsa Indonesia tidak dapat disubordinasikan dengan tuntutan-tuntutan standar pendidikan nasional, regional dan internasional. Sebab anak bangsa Indonesia tetap merupakan suatu subjek bermartabat yang perlu dijadikan titik tolak di dalam setiap upaya untuk mencapai dan meningkatkan standar pendidikan.

Di sisi lain, sesungguhnya fungsi standar dalam pendidikan adalah bertujuan memetakan masalah pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, keberadaan standar seakan-akan telah menjadi milik birokrasi pendidikan sehingga peserta-didik semata-mata menjadi objek dari kekuasaan birokrasi. Oleh karena itu, proses belajar dapat terarah hanya dengan mempersiapkan ujian nasional yang telah ditentukan oleh birokrasi pendidikan dan bukan melalui proses belajar berkesinambungan yang diadakan secara berkala oleh guru. Kelulusan seharusnya bukan hanya bertumpu dan ditentukan semata-mata oleh ujian nasional. Tetapi kelulusan merupakan suatu proses integratif dalam pendidikan yang mempunyai banyak segi.⁸

Penyelenggaraan pendidikan di semua negara menganut berbagai pemikiran. Salah satunya adalah adanya keharusan

⁸ H. A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Renika Karya, 2006), hlm. 108.

mengakses pendidikan dasar yang harus diikuti oleh semua warga negara. Keterlaksanaan hal itu dapat memberikan arti pewujudan kesetaraan pendidikan yang merata sehingga rakyat Indonesia memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap untuk dapat hidup bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, secara teoritis sebagaimana diungkap oleh M. Levin, dari Stanford University bahwa pendidikan seharusnya menyiapkan empat (4) hal bagi peserta didik maupun luas, yakni; (1). *Civic competence*, (2). *Social cultural competence*, (3). *Economic competence*, (4). *Cultural competence*. Bila hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 Ayat (2) yang dinyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan" lalu diikuti pasal 31 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, maka pengembangan pendidikan di Indonesia seharusnya didasarkan pada asas pemerataan, termasuk dalam mutu pelayanan dan sistem pengelolanya.

Bertolak dari uraian di atas maka sesungguhnya: pertama, pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya; Kedua, setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan menengah dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan tetapi tidak wajib membiayainya. Akan tetapi di negara-negara lain seperti Swe-

dia, Norwgia, Denmark, penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah. Bahkan peserta didik jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi tidak dipungut biaya. Sedangkan di negara-negara seperti Belanda, Perancis, dan Inggris sama-sama tidak dipungut biaya. Pendidikan wajib di negara-negara yang disebutkan tadi, kesemua peserta didik wajib diterima oleh satuan pendidikan. Bahkan mereka bukan hanya tidak dipungut biaya, tetapi juga disuplai keperluan pendidikannya seperti buku, dan perlengkapan sekolah. Semua uang transpor pun ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sedangkan pendidikan tidak wajib (pendidikan tinggi) dimulai dari kelas XI. Penerimaan peserta didik harus dilalui dengan memenuhi syarat akademik. Biaya pendidikan pun ditanggung oleh peserta didik.

Pada jenjang perguruan tinggi di Amerika, kesemua pesera didik diwajibkan membayar, tatapi untuk pendidikan wajib 12 tahun dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah federal. Pada saat yang bersamaan, pemerintah setempat juga memberikan beasiswa bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bahkan pemerintah federal menyiapkan dana tidak kurang 100 miliar dollar AS dalam setiap tahunnya untuk kebutuhan beasiswa. Bila di negara-negara sebagaimana disebut di atas alokasi biaya demikian

yang begitu besar diditribusikan untuk kepentingan anak bangsa maka dalam konteks kebangsaan pantaslah kalau mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada negaranya. Sedangkan di Indonesia, para orang tua kurang merasakan jasa pemerintah maka berlakulah paradigma *rate of return*. Investasi yang ditanam oleh orangtua selama sekolah, harus segera kembali.⁹

C. Manajemen Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

Tolok ukur dari keberhasilan dari sekolah sangat ditentukan oleh kualitas manajemen/tatakelola yang dipraktikan pada sekolah yang bersangkutan. Pengelola SBI/RSBI harus kerja keras untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang sudah terlanjur diberi label internasional tersebut menjadi ikon pendidikan di Indonesia. Jika SBI telah menetapkan 8 standar plus mengadopsi kurikulum dari sekolah di negara maju, maka kosnekuensi logisnya adalah sekolah tersebut harus bekerja keras untuk mencapai standar tersebut. Akan tetapi, mampukah sekolah bertaraf internasional menerapkannya? Mengingat beban yang harus ditanggung oleh sekolah tersebut begitu berat. Misalnya saja, di beberapa daerah, tingkat kelulusan peserta didik SBI/RSBI dalam ujian nasional (UN) justru mengalami penurunan dibanding dengan

⁹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT. Kompas, 2008), hlm. 321

tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan kualitas satuan pendidikan berstatus SBI. Sebab, mereka berharap SBI akan menjadi pelopor dan contoh dalam menghasilkan tingginya tingkat kelulusan UN. Sayangnya, kenyataan berkata lain sehingga sulit membedakan mana SBI/RSBI dan mana yang tidak. Memang sesungguhnya keberhasilan dalam UN tidak bisa dijadikan indikator satu-satunya, akan tetapi hasil UN akan menjadi demikian dicermati oleh masyarakat. Jika tingkat kelulusannya terus menurun bagaimana masyarakat bisa percaya. Ironisnya, pengelola SBI juga meminta dana lebih dibanding sekolah lainnya.

Mengatasi kesenjangan sebagaimana di atas, perlu kiranya ditetapkan langkah-langkah strategis dengan membuat perencanaan dengan melakukan analisis meliputi bagaimana kondisi sekolah saat ini, kondisi sekolah yang diharapkan (*expected condition*), strategi dan tahapan-tahapan pencapaiannya. Dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang dikehendaki, akan dapat diketahui kesenjangan yang ada, baik dari segi fasilitas, guru, manajemen sekolah, dan mutu lulusannya. Selanjutnya sekolah harus mengembangkan sumber daya pendidikan yang dimiliki, terutama dalam aspek sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dituntut profesional dan tangguh. Hal itu

bisa ditunjukkan oleh penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki wawasan global.

Sebagai satuan pendidikan yang memiliki label internasional, pengelola SBI berupaya meningkatkan diri secara bertahap dan berkelanjutan, terutama dalam bidang manajemen dan ketrampilan komunikasi dalam bahasa asing. Begitu juga pengembangan guru-guru harus dilakukan secara bertahap sehingga karakteristik sekolah bertaraf internasional tercermin dari profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam berbagai hal yang meliputi: kemampuan bekerja secara kolaboratif dan pemberdayaan bersama serta didukung oleh kepemimpinan yang transformatif dan visioner. Selain itu, sekolah bertaraf internasional juga harus mampu memenuhi tuntutan global yang mengharuskan penguatan tata kelola dicirikan antara lain dengan adanya transparansi, akuntabilitas, profesional, demokratis, dan *good governance*. Pencapaian ke arah itu, harus didukung oleh adanya intensifikasi sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian juga dalam hal pengembangan kurikulum, harus mampu mengadopsi maupun adaptasi terhadap perkembangan kurikulum dari negara-negara maju. Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan tidak

bertentangan dengan ideologi Pancasila, nilai-nilai agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pengembangan sekolah bertaraf internasional bagaimanapun perstisiusnya tetap memiliki banyak kelemahan. Hal itu tercermin dari belum adanya sistem yang terbangun secara kuat pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Apalagi jika ditilik dari penggunaan bahasa asing sebagai *medium of instruction*-nya pada mata pelajaran *hard sains*. Padahal di negara-negara lain, seperti Jepang, Perancis, dan Jerman, kemajuan sekolah tidak harus ditempuh dengan menggunakan penguasaan bahasa asing. Bahkan pada tahun 2011, Malaysia sudah ancap-ancang mencabut penggunaan bahasa asing (Inggris) sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Menyikapi banyaknya suara kritis yang dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap program sekolah bertaraf internasional, tidak seharusnya serta-merta menjadikan arah pendidikan harus berbelok arah. Untuk itu, bersikap kritis terhadap persoalan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting yang antara lain sebagai berikut; pertama, melihat Indonesia sebagai negara kesatuan yang begitu luas, pendidikan seharusnya mampu menjangkau ke semua wilayah dengan segala aneka keragaman budayanya. Karena setiap warga Indonesia di manapun tempatnya, memiliki hak sama

untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Pendidikan dalam hal ini, secara institusi maupun substansi tidak harus membedakan suku, bangsa, ras, bahasa, serta agama dan adat istiadat warga Indonesia. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang bermutu.

Kedua, pendidikan sebagai lembaga, di samping memiliki fungsi edukasi juga memiliki fungsi dalam melahirkan manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme, yaitu manusia yang cinta kepada tanah air dan siap berkorban untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, munculnya sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah yang telah banyak menyedot dana rakyat, seharusnya tidak memicu kesenjangan, apalagi kecemburuan yang kemudian menimbulkan disintegrasi bangsa.

Ketiga, pendirian sekolah bertaraf internasional yang digagas untuk bisa mengangkat mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dalam konteks globalisasi nilai, norma, dan budaya, harus mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar bangsa Indonesia. Ancaman globalisasi tersebut diantaranya hilangnya nilai-nilai tradisi, semakin luntarnya adat istiadat, dan berbagai bentuk penyimpangan sosial dengan segala modus operandinya. Hal inilah yang menyebabkan peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa

tidak boleh tereduksi oleh program SBI. Naasnya kurikulum yang diadopsi atau diadaptasi berasal dari negara-negara maju yang memiliki kultur dan budaya berbeda dengan bangsa Indonesia.

D. Simpulan

Dari berbagai telaah dan analisis munculnya persoalan-persoalan pendidikan di atas, ditengarai ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan internasional di Indonesia, yaitu: pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih banyak menggunakan pendekatan *education function* atau *input-output* tanpa analisis yang konsekuen. Artinya, jika semua kebutuhan pendidikan di-suplay maka *out-put* akan seperti yang diharapkan. Pendekatan ini menganggap jika input seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan kelengkapan sarana-prasarana telah dipenuhi dengan sendirinya mutu pendidikan (*out-put*) secara otomatis akan terjadi. Sayangnya pendekatan ini menegasikan proses pendidikan yang merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan.

Kedua, pada umumnya penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik-sentralistik. Hal ini mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang. Ini menyebabkan keputusan yang dikeluarkan SBI sulit diambil, karena adanya birokrasi

tersebut. Sekolah juga sering kehilangan kemandirian, kreativitas, dan inisiatif untuk memajukan lembaganya termasuk dalam bidang manajemen dan peningkatan sumber daya tenaga kependidikannya. Ketiga, minimnya partisipasi warga sekolah dan orang tua murid dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, kepedulian orang tua murid pada umumnya terbatas pada dukungan dana. Sedangkan sumbangan pemikiran, ide, gagasan, inovasi dari masyarakat kurang mendapatkan penyaluran. Akibatnya akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga melemah. Sekolah kurang memiliki beban tanggungjawab hasil pendidikan kepada masyarakat (*stakeholders*). Untuk itu, sekolah berbasis internasional sepatutnya tidak hanya mempromosikan kurikulum, fasilitas, guru dari luar negeri dan program sekolah perlu perhatian serius. Sebab, kesemuanya merupakan penentu keberhasilan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. 2009. *Profil Pendidikan Islam*. Jakarta: Depag.
- Tilaar, H. A,R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Renika Karya
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas
- Chan, Sam M. & Tuti T. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Usman, Husaini. 2010. *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Qamar, Mujamil. 2010. *Epistemologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga